

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Memasuki tahun 2000 Indonesia mulai menerapkan sistem pemerintahan desentralisasi yang mensyaratkan perlunya pemberian otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah (Nugroho & Budiantara 2016). Munculnya otonomi daerah dikarenakan adanya reformasi dalam menciptakan sistem pemerintah baru yang berarti daerah diberi kewenangan untuk mengatur serta mengurus sendiri daerahnya (Zulkarnain & Ningrum 2020). Otonomi daerah sebagai upaya pelimpahan fungsi, tugas dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah membawa perubahan besar dalam tata penyelenggaraan pemerintahan di daerah, khususnya berkaitan dengan masalah sumber-sumber keuangan yang akan digunakan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat yang dilimpahkan dan didelegasikan kepadanya (Fatmawati et al. 2021).

Terjadinya reformasi manajemen keuangan di sektor publik menyebabkan adanya perubahan dan perbaikan pada pengelolaan keuangan di pemerintahan. Pengelolaan keuangan secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan (*Good Government Governance*) yang baik (Aswar 2020). Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian

laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah (Aswar 2020). Menurut Madhu (2012) dalam tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi berarti menciptakan sistem transparan bagi warga untuk ditindaklanjuti (Suwanda & Suryana 2021).

Menurut Mardiasmo (2002) akuntabilitas publik merupakan kewajiban yang diberikan oleh pemegang amanat akuntabilitas dalam menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan semua kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberi tugas (Nugroho et al. 2020). Menurut Budiyo (2016) dalam Khasanah dan Pramudyastuti (2019) menyatakan meningkatkannya kualitas laporan keuangan pada pemerintahan di Indonesia Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan persyaratan yang berkekuatan hukum. Dalam SAP terdapat empat persyaratan karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan mudah dipahami

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyebutkan bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan harus memenuhi prinsip-prinsip SAP (Ternalemta et al. 2011). Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa penerapan SAP dalam suatu organisasi telah dilaksanakan dengan baik, sistem pengendalian intern yang dijalankan sudah jelas dan sumber daya manusia yang bekerja dalam organisasi tersebut sudah kompeten dan mampu menjalankan sistem informasi yang baik pula (Putri 2020). Penerapan SAP berbasis akrual telah dilakukan secara bertahap dari SAP berbasis kas menuju akrual menjadi SAP berbasis akrual penuh, hal ini karena

SAP berbasis Akrual dianggap sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini (Ardianti et al.2018). Salah satu hasil studi yang dilakukan oleh IFAC *Public Sector Committee* (2002) menyatakan bahwa pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan (Ayu & Kusumawati 2020).

**Tabel .1.1 Penerapan Akuntansi berbasis akrual di Indonesia**

Tahun	Kejadian Penting
2003	Penerbitan UU No. 17 Tahun 2003 yang berlaku mulai tanggal 5 April 2003 pada pasal 36 ayat 1 berisi ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan belanja berbasis akrual.
2005	Penerbitan PP 24 Tahun 2005 tentang proses transisi penyusunan laporan keuangan berbasis kas menuju laporan keuangan berbasis akrual yaitu SAP
2010	Penerbitan PP 71 Tahun 2010 berisi tentang Ketentuan penggunaan SAP berbasis Akrual dilaksanakan paling lambat tahun 2014 dan penggunaan SAP berbasis kas menuju berbasis akrual dengan masa transaksi 4 tahun hanya berlaku hingga tahun 2014
2015	Diselenggarakannya Kick Off Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual oleh kementerian keuangan agar dapat menciptakan momentum implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual serta untuk berkomitmen mempertahankan peningkatan kualitas pelaporan keuangan.
2015	Penerbitan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan nomor S-9180/PB/2015 hal Penyusunan Pseudo Laporan Keuangan Tahun 2015 menerangkan bahwa perlu diadakannya evaluasi terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual.

Sumber: Herwiyanti et al. (2017)

Pendidikan dan pelatihan dibutuhkan dalam sebuah organisasi, hal ini berguna dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja pegawai agar dapat lebih terpacu (Putri 2020). Pendidikan dan pelatihan yang sesuai dapat membuat seorang pegawai mampu menghadapi permasalahan ketika sedang mengerjakan laporan keuangan,

selain itu pendidikan dan pelatihan juga dapat meningkatkan pemahaman serta sikap seorang pegawai dalam menyusun laporan keuangan. Pada sisi organisasi dilakukannya pendidikan serta pelatihan dapat meningkatkan produktifitas kerja para pegawai yang berdampak baik untuk kemajuan organisasi (Budiono et al. 2018).

Menurut Teguh (2008) pengalaman kerja adalah ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang dapat memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakan dengan baik (Sukriani et al. 2018). Menurut Sulistyani (2004) menyatakan pengalaman kerja membuat seseorang dapat meningkatkan pengetahuan teknis maupun keterampilan kerja dengan mengamati orang lain, menirukan dan melakukan sendiri tugas-tugas pekerjaan yang ditekuninya (Murina & Rahmawaty 2017). Mengulang pekerjaan dapat membuat seseorang menjadi terbiasa dan lebih paham sehingga kemungkinan untuk melakukan kesalahan menjadi semakin kecil dan pegawai dapat lebih praktis dan efisien dalam melakukan pekerjaannya (Ardianti et al. 2018).

Secara umum teknologi informasi tidak hanya bermanfaat pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintah (Wulan D et al. 2020). Teknologi informasi memiliki manfaat yang berhubungan dengan akuntansi yaitu dari proses awal pembukuan transaksi hingga pembuatan laporan keuangan sehingga proses akuntansi dapat terkomputerisasi dan menciptakan laporan keuangan yang baik. Program tersebut merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan *good governance government*, yang bertujuan untuk penertiban administrasi agar terciptanya transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah (Wulan D et al. 2020).

Penyajian laporan keuangan pada pemerintah merupakan hal yang masih menarik untuk diteliti salah satunya berubahnya aturan pemerintah dari penggunaan sistem akuntansi berbasis kas menuju sistem akuntansi berbasis akrual membutuhkan kesiapan pemerintah (Marisa et al. 2020). Kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai (Millah et al. 2019). Sering kali instansi pemerintah daerah melakukan penataan personil yang tidak sesuai dengan kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitas (Rachmawati & Anik 2020). Dalam pelaksanaannya sumber daya manusia kadang akan melakukan kesalahan dalam memahami penerapan ilmu akuntansi yang ada dan berdampak pada penyusunan laporan keuangan, seperti adanya kekeliruan dalam pembuatan laporan keuangan sehingga menyebabkan kualitas pada laporan keuangan menjadi tidak sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah (Rohadi GP et al. 2020).

Pembuatan laporan keuangan oleh pegawai yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai, menjadi salah satu kendala dalam proses penyusunan laporan keuangan (Putri 2020). Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang berbanding terbalik dengan jumlah sumber daya manusia yang begitu besar apabila didayagunakan secara efektif dan efisien akan bermanfaat untuk membantu lajunya pertumbuhan negara yang berkelanjutan (Erna 2020). Belum meratanya pelatihan yang di berikan berakibat tidak optimalnya kemampuan pegawai dalam penyajian pada laporan keuangan (Zulkarnain & Ningrum 2020).

Keterampilan (*Skill*) pegawai dapat diukur dengan lama masa kerja atau pengalaman kerjanya (Budiono et al. 2018). Pada hakikatnya pengalaman adalah

pemahaman terhadap sesuatu yang dihayati dan dialami maka diperoleh pengalaman, keterampilan ataupun nilai yang menyatu pada potensi diri (Budiono et al. 2018). Pengalaman kerja dapat menentukan seorang pegawai dalam melaksanakan suatu tugas tertentu, tetapi dalam kenyataannya yang terjadi bahwa tidak semua pegawai sering melakukan pekerjaan yang menjadi tugasnya tanpa melakukan kesalahan pengerjaan (Budiono et al. 2018).

Manfaat dari teknologi informasi adalah kecepatan pemrosesan data atau transaksi dan penyiapan laporan, dapat menyimpan data dalam jumlah yang besar, meminimalisir terjadinya kesalahan, dan biaya pemrosesan lebih rendah (Rohadi GP et al. 2020). Menurut Haza (2015) teknologi informasi bermanfaat dalam pelaksanaan tugas-tugas akuntansi, namun jumlah komputer, jaringan internet dan proses akuntansi sejak awal transaksi hingga membuat laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi harus diperhatikan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Ternalemta et al. 2011). Sumber daya manusia yang belum dapat beradaptasi dan menggunakan fasilitas teknologi informasi secara maksimal atau masih kurangnya pelatihan IT kepada para pegawai (Binawati & Susliyanti 2018).

Menurut hasil penelitian Sukamdaru et al. (2017) menyatakan aparat pemerintah akan memiliki tanggung jawab kepada laporan keuangan sehingga partisipasi dari petugas keuangan saat pelatihan akan menjadi penyempurna keterampilan serta memudahkan dalam mengerjakan pekerjaan. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa pemahaman tentang pemerintah daerah, pemahaman aparat atas laporan keuangan berbasis akrual dapat terlahir dari pengalaman kerja (Sukamdaru at

el. 2017). Akan tetapi penelitian ini tidak dapat membuktikan laporan keuangan berbasis akrual mempengaruhi pendidikan (Sukamdaru et al. 2017).

Masih terdapatnya ketidaksesuaian antara penempatan petugas dalam pekerjaan dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan sehingga menyebabkan setiap masalah yang muncul tidak dapat dianalisis secara menyeluruh (Sukamdaru et al. 2017). Penelitian ini juga tidak dapat membuktikan bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap pemahaman petugas dalam menjalankan laporan keuangan berbasis akrual (Sukamdaru et al. 2017). Hal ini menyatakan bahwa belum berhasilnya keuangan berbasis akrual dalam mengintegrasikan sistem informasi (Sukamdaru et al. 2017).

Penelitian Budiono et al. (2018) menghasilkan hipotesis bahwa pendidikan dan pelatihan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah, hal ini dikarenakan semua pegawai memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam laporan keuangan daerah program pelatihan yang dilakukan oleh lembaga tidak selalu bisa memperbaiki kinerja pegawai yang buruk (Budiono et al. 2018). Selain itu pengalaman kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah teknologi informasi bermanfaat dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan akuntansi yaitu dari proses awal pembukuan transaksi hingga pembuatan laporan keuangan sehingga proses akuntansi dapat terkomputerisasi dan menciptakan laporan keuangan yang baik (Budiono et al. 2018).

Hal ini dikarena tidak semua pegawai melakukan pekerjaan yang sekarang menjadi tanggung jawabnya dan mengerjakan pekerjaan tanpa ada kesalahan (Budiono et al. 2018). Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Budiono et al. 2018). Hal tersebut karena semua pegawai keuangan telah menggunakan komputer untuk menginput data dan mengolah data secara sistematis sehingga data yang dihasilkan tepat waktu dan dapat diandalkan serta memanfaatkan jaringan internet sebagai penghubung dalam pengiriman informasi (Budiono et al. 2018).

Hasil penelitian Ardianti et al. (2018) menyatakan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pegawai keuangan dapat membedakan pemahaman SAP berbasis akrual. Tingkat pendidikan yang memadai diperlukan bagi pegawai keuangan dalam memahami SAP berbasis akrual untuk memenuhi tuntutan publik atas tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan (Ardianti et al. 2018). Hasil Penelitian menjelaskan bahwa pengalaman kerja berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan daerah (Ardianti et al. 2018). Semakin lama masa kerja seseorang dapat mencerminkan pemahaman atas tugas yang berhubungan dengan pekerjaan (Ardianti et al. 2018). Hasil peneltian menunjukkan terdapat perbedaan pemahaman SAP berbasis akrual yang signifikan antara pegawai keuangan yang pernah mengikuti pelatihan dengan pegawai yang tidak pernah mengikuti pelatihan (Ardianti et al. 2018).

Pelatihan yang diikuti pegawai keuangan dapat meningkatkan pemahaman atas SAP berbasis akrual, hal ini menunjukkan terdapat perbedaan pemahaman SAP

berbasis akrual antara pegawai keuangan yang memiliki jabatan sebagai penyusun laporan keuangan dan selain penyusunan laporan keuangan (Ardianti et al. 2018). Perbedaan pemahaman SAP berbasis akrual antara pegawai keuangan yang memiliki jabatan sebagai penyusun laporan keuangan dan selain penyusun laporan keuangan secara statistik signifikan (Ardianti et al. 2018). Jabatan sangat erat hubungannya dengan tugas dan wewenang yang dilakukan dalam penyusun laporan keuangan seperti mencatat, menggolongkan, dan mengiktisarkan transaksi keuangan hingga menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan, sehingga jabatan penyusun laporan keuangan lebih paham terkait standar akuntansi yang digunakan (Ardianti et al. 2018).

Menurut Wulan D et al. (2020) dalam penelitiannya menyatakan latar belakang pendidikan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, karena latar belakang pendidikan yang baik akan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini dikarenakan pengoptimalan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dapat membangun jaringan sistem informasi manajemen sehingga memungkinkan pemerintah bekerja secara terpadu (Wulan D et al. 2020). Pemahaman laporan keuangan berpengaruh terhadap kualitas keuangan pemerintah daerah yang berarti pegawai mengerti dan paham bagaimana proses akuntansi dilakukan hingga menjadi suatu laporan keuangan yang berpedoman pada

prinsip dan standar penyusunan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 (Wulan D et al. 2020).

Zulkarnain dan Ningrum (2020) dalam penelitiannya menyatakan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil temuan di lapangan ketika mewawancarai responden ditemukan bahwa pegawai belum mendapatkan pelatihan akuntansi yang memadai, hal ini menyebabkan masih belum optimalnya kompetensi mereka dalam bidang akuntansi (Zulkarnain & Ningrum 2020). Hasil temuan lain dari penulis menemukan bahwa pemerintah daerah kota Sukabumi menggunakan jasa mitra eksternal dalam menyelesaikan laporan keuangan (Zulkarnain & Ningrum 2020).

Penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, selain itu Penerapan Standar Akuntansi pemerintahan (SAP) berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Zulkarnain & Ningrum 2020). Hasil penelitian ini membawa indikasi bahwa untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Sukabumi dituntut untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan penerapan standar akuntansi pemerintahan dilingkungan kerjanya (Zulkarnain & Ningrum 2020).

Putri (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa secara simultan pendidikan, pelatihan teknis keuangan, dan lama pengalaman pegawai tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh. Hasil penelitian pendidikan dan pengalaman kerja pegawai memiliki pengaruh positif secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, sedangkan pelatihan teknis keuangan memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh (Putri 2020).

Dari kejadian tersebut membuat penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai laporan keuangan berbasis akrual di pemerintahan. Dokumen sumber pada pelaporan keuangan berbasis akrual di pemerintahan berasal dari tingkat satuan kerja, selain itu masih ditemukan beberapa staf keuangan dengan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan tugasnya seperti masih terdapat Bendahara Pengeluaran (BP), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan staf keuangan dengan pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau setingkat SLTA. Pelatihan – pelatihan yang disediakan oleh kementerian keuangan untuk staf keuangan juga masih sangat terbatas, karena tidak semua staf di bagian keuangan terdaftar untuk mengikuti pelatihan yang disediakan oleh departemen keuangan.

Pengalaman kerja seorang pegawai juga belum tentu membuat pegawai tersebut tidak melakukan kesalahan sama sekali karena masih terdapat pegawai yang masih salah dalam penulisan maupun pengecekan pada berkas keterangan surat perintah pembayaran pembelian barang dan salah pada pengisian jumlah nominal pajak maupun nomor bukti pembayaran pajak pada saat validasi pajak, pemilihan

akun, keterangan pada dokumen sumber ataupun pada aplikasi akuntansi pemerintah berbasis akrual tersebut. Berkembangnya aplikasi laporan keuangan berbasis akrual pemerintah di setiap tahunnya juga membutuhkan pelatihan dan pengenalan kembali sehingga pembaharuan software teknologi Informasi tersebut menuntut seorang pegawai untuk selalu belajar dan berlatih mengenai aplikasi pemerintahan tersebut.

Dalam pelaksanaannya masih terdapat *error* pada aplikasi akuntansi pemerintahan seperti ketika terjadi kesalahan pengisian pada sebuah kuitansi yang didalamnya terdapat keterangan pajak, maka jika kuitansi tersebut salah dmaka harus di hapus selain itu keterangan pada bagian pajaknya juga harus di hapus sehingga pada saat transaksi tidak terdapat tentang pajak sebelumnya atau bisa menyebabkan keterangan di bagian pungut pajak pada transaksi menjadi berlipat. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti di lingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi DI. Yogyakarta, Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional D.I. Yogyakarta, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi, Balai Pelaksana Perumahan Jawa III dan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Sukamdaru et al. (2017). Judul penelitiannya ini yaitu “*Understanding Factors Affecting Local Administration Reform on Accrual-Based Financial Statements*”. Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis tertarik meneliti mengenai “Pengaruh Pelatihan, Pendidikan, Pengalaman Kerja, dan Kualitas Teknologi

Informasi Terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Berbasis AkruaI di Kementerian PUPR Regional D.I. Yogyakarta.”

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah pelatihan berpengaruh positif terhadap pemahaman laporan keuangan berbasis akruaI di Kementerian PUPR Regional D.I. Yogyakarta?
2. Apakah pendidikan berpengaruh positif terhadap pemahaman laporan keuangan berbasis akruaI di Kementerian PUPR Regional D.I. Yogyakarta?
3. Apakah pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap pemahaman laporan keuangan berbasis akruaI di Kementerian PUPR Regional D.I. Yogyakarta?
4. Apakah kualitas teknologi informasi berpengaruh positif terhadap pemahaman laporan keuangan berbasis akruaI di Kementerian PUPR Regional D.I. Yogyakarta?

## **1.3 Batasan Penelitian**

Pembatasan masalah dibuat agar dapat meniadakan penyimpangan maupun menghindari agar tidak terjadi pelebaran dari pokok masalah sehingga laporan lebih terarah serta mudah dipahami. Pada penelitian ini penulis menyatakan :

1. Variabel independen yang diteliti dalam penelitian ini adalah pelatihan, pendidikan, pengalaman kerja dan kualitas teknologi informasi.
2. Variabel dependen yang diteliti dalam penelitian ini adalah laporan keuangan berbasis akruaI.

3. Sample yang diteliti dalam penelitian ini adalah PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), verifikator keuangan, staff bagian keuangan dan bagian Pengelolaan pada Kementerian PUPR Regional DI Yogyakarta yang terbagi pada di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi DI. Yogyakarta dan Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional D.I. Yogyakarta yang mewakili Direktorat Jenderal Bina Marga, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi yang mewakili Direktorat Jenderal Konstruksi, Balai Pelaksana Perumahan Jawa III yang mewakili Direktorat Jenderal Perumahan dan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak yang mewakili Direktorat Jenderal SDA.
4. Periode dalam penelitian ini yaitu dari tanggal 17 Mei hingga 21 Juni 2021.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan yang sesuai dengan latar belakang serta rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah pelatihan berpengaruh positif terhadap laporan keuangan berbasis akrual di Kementerian PUPR Regional D.I. Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui apakah pendidikan berpengaruh positif terhadap laporan keuangan berbasis akrual di Kementerian PUPR Regional D.I. Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui apakah pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap laporan keuangan berbasis akrual di Kementerian PUPR Regional D.I. Yogyakarta.

4. Untuk mengetahui apakah kualitas teknologi informasi berpengaruh positif terhadap laporan keuangan berbasis akrual di Kementerian PUPR Regional D.I. Yogyakarta.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa manfaat yang dapat membantu beberapa pihak, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini bisa bermanfaat dan memberikan tambahan ilmu mengenai pemahaman laporan keuangan yang berbasis akrual yang dipengaruhi oleh pelatihan, pendidikan, pengalaman kerja, dan kualitas teknologi informasi serta penerapan Teori *New Public Management* (NPM) dimana teori ini akan menjelaskan keterkaitan antara variabel – variabel yang terdapat dalam penelitian sehingga diketahui terdapat faktor – factor yang mendukung laporan keuangan berbasis akrual yang terdapat di instansi pemerintah dan disajikan dengan lebih transparan dan akuntabel.

2. Manfaat Praktis

Manfaat untuk penulis yaitu semua tahapan dalam penelitian serta hasil yang diperoleh dapat mempergunakan pengetahuan yang diperoleh mengenai pemahaman laporan keuangan berbasis akrual yang sedang diberlakukan saat ini. Selain itu penelitian ini diharapkan menambah ilmu serta informasi yang berkaitan dengan pemahaman laporan keuangan

berbasis akrual di instansi pemerintah kepada masyarakat. Sehingga upaya yang dilakukan pemerintah dalam menerapkan laporan keuangan berbasis akrual yang transparan dan akuntabel dapat tercipta.

## **1.6 Sistematika Penelitian**

Pada penelitian ini, sistematika penulisan terdiri dari lima bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan mengenai ulasan singkat yang dipaparkan dalam penelitian ini.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini terdiri dari landasan teori yang dipakai dalam penelitian yang berisi teori yang digunakan, hubungan antara teori dengan variabel dependennya serta definisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laporan keuangan berbasis akrual serta pengembangan hipotesis dari penelitian ini.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi uraian gambaran mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis data dan sumber data, alat analisis data, teknik pengumpulan data, definisi operasional penelitian, instrument penelitian, metode analisis data, uji asumsi klasik penelitian dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, Metode analisis yang digunakan dalam mengolah data yang dilakukan pada bab sebelumnya yang terdiri dari data statistik deskriptif. Uji instrument yang berisi uji validitas, uji reabilitas dan uji klasik. Analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis yang berisi uji t dengan pembahasan yang merupakan interpretasi hasil penelitian ini akan memberikan jawaban atas permasalahan dari penelitian. Sesuai dengan hipotesis awal atau tidak, serta berisi mengenai pembahasan hasil penelitian.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan kesimpulan dari semua analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian serta saran yang dapat dipertimbangkan dalam penelitian selanjutnya.